

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Semenanjung Korea pada awalnya merupakan bagian dari wilayah imperialism Jepang pada masa perang dunia II. Namun dikarenakan Jepang mengalami kekalahan pada agustus 1945, maka jepang menyerah kepada sekutu Dan wilayah Semenanjung Korea di ambil alih oleh Uni Soviet pada saat itu.¹ Pasca menyerahnya Jepang kepada sekutu, kemudian diadakanlah perundingan antara Uni Soviet dan AS untuk membagi korea menjadi dua bagian, yaitu ; selatan dan utara.

Korea Utara dan Korea Selatan pada masing-masing nya berada di bawah kekuasaan Negara yang memiliki kekuatan besar di dunia. Korea Selatan berada di bawah kekuasaan AS sedangkan Korea Utara berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Kedua Negara yang sudah terbagi ini pun memiliki ideology yang berbeda. Jika Korea Selatan cenderung berideologi liberalis karna adanya dukungan dari AS, maka Korea Utara cenderung lebih komunis layaknya Uni Soviet. Perbedaan ideology ini lah yang membuat kedua Negara berkembang secara berbeda.

¹ AEDT, "Sejarah di Balik Ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan: Kilas Balik", diakses dari radio australia: <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-04-05/sejarah-di-balik-ketegangan-korea-utara-dan-korea-selatan-kilas-balik/1112046> pada tanggal (11 november 2016).

Hubungan kedua nya kian memanas pada tahun 1950 dimana Korea Utara melakukan invasi dan penyatuan Korea secara paksa, tindakan ini mengakibatkan keikutsertaan PBB dalam pembagian wilayah. Konflik ini juga diakibatkan karna adanya pembagin Korea serta upaya dari kedua Negara (korea) untuk melakukan reunifikasi korea di bawah pemerintahan masing-masing. Meskipun demikian, perang ini sempat mereda karena adanya gencatan senjata pada tahun 1953. Pasalnya, Korea Selatan dan Korea Utara tidak pernah menandatangani kesepakatan ataupun perjanjian damai, sehingga kedua nya masih resmi dalam status perang. Pada dasarnya, kedua Negara sudah melakukan banyak upaya untuk melakukan reunifikasi, namun tidak berhasil. Perlu untuk diketahui bahwa perang ataupun konflik korea tersebut memakan banyak korban dan mengakibatkan banyak rakyat Korea Selatan yang terpisah dari sanak saudara nya yang berada di Korea Utara.²

Korea Utara yang pada awalnya tumbuh sebagai Negara yang cenderung miskin dibandingkan korea selatan, namun bisa bangkit dengan upaya pengembangan senjata nuklir sebagai alat perlindungan Negara nya sekaligus alat diplomasi dengan Negara lain. Pengembangan nuklir merupakan hasil dari kerjasama nya dengan Uni Soviet, dimana para tentara dilatih untuk membuat nuklir di Uni Soviet yang kemudian di terapkan di korea utara

Pengembangan nuklir yang dillakukan oleh Korea Utara justru di anggap sebagai ancaman bagi Korea Selatan karna dapat mengancam stabilitas keamanan

² Mohtar Mas'ood, Yang Seung-yoon, "Memahami politik Korea", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2005), Hal. 238.

Negara nya. Isu pengembangan nuklir Korea Utara menjadi sorotan yang penting bagi Korea Selatan dan bahkan dunia internasional karna merupakan isu yang sangat sensitive.

Banyak upaya yang dilakukan dunia internasional untuk menyatukan kedua Negara ini, serta memperbaiki hubungan diantara keduanya. Namun usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang signifikan justru terlihat sia-sia. Begitu juga yang dilakukan oleh Korea Selatan karna hanya mendapat respon yang kurang dari Korea Utara. Namun usaha Korea Selatan tidak sampai di situ saja, buktinya pada tahun 1998 ada kebijakan baru terkait upaya perdamaian antara kedua Negara.

Sunshine policy merupakan salah satu cara yang digunakan Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan nya dengan korea utara. *Sunshine policy* merupakan kebijakan diplomasi milik Presiden Korea Selatan yaitu Kim Dae Jung yang di gagas untuk menghadapi Korea Utara. Kebijakan yang lebih mengedepankan pendekatan secara damai dengan menjalin kerjasama di bidang ekonomi dan kemanusiaan serta memajukan rekonsiliasi untuk mengarah pada penyatuan Korea kembali.³

Pada awalnya kebijakan ini berjalan dengan baik, di tandai dengan adanya undangan dari Presiden Kim Jong II pada oktober 1998 kepada pemimpin Hyundai yaitu Chung Ju-Yung Pemimpin Hyundai di undang adalah untuk

³ Rio Ria Sugianto, "Korea selatan & korea Utara Dalam Bingkai Sunshine Policy", diakses dari situs ilmu hubungan internasional: <http://www.ilmu-hi.com/korea-selatan-korea-utara-dalam-bingkai-sunshine-policy/#> pada tanggal (11 november 2016) pukul 19:54

membicarakan negosiasi dan kesepakatan atas peresmian salah satu tempat di Korea Utara sebagai tujuan wisata turis.⁴

Sunshine Policy nyata nya mendapat respon yang cukup baik dari Korea Utara pada saat itu. *Sunshine Policy* terbilang berhasil pada masa pemerintahan presiden Kim Dae Jung karna terbukti dengan di selenggarakan nya konferensi konferensi tingkat tinggi inter Korea yang di laksanakan di Pyongyang pada tahun 2000. KTT sendiri merupakan bentuk dari terealisasinya *Sunshine Policy*.

Sunshine Policy nyata nya mendapat respon yang cukup baik dari Korea Utara pada saat itu. *Sunshine policy* terbilang berhasil pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae Jung karna terbukti juga pada tahun 2000 terselenggaranya konferensi tingkat tinggi inter korea yang di laksanakan di Pyongyang. KTT sendiri merupakan bentuk dari terealisasinya *Sunshine Policy*. Kemudian tahapan-tahapan selanjutnya mulai dibicarakan setelah KTT di laksanakan.

Seperti mempertemukan keluarga yang terpisah akibat perang Korea beberapa tahun silam. Namun keharmonisan hubungan antara kedua nya seperti tidak bertahan lama, pasalnya Korea Utara keluar dari perjanjian dan mengeluarkan pernyataan bahwa Negara nya kembali mengaktifkan nuklir pada tahun 2002. Hubungan kedua nya pun kembali renggang.

⁴ sasmithaningtyas laraswari, m. k “Dinamika Implementasi Sunshine Policy oleh Korea Selatan Dalam Rangka Reunifikasi Korea (1998 - 2003)”, diakses dari <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S47268> Sasmithaningtyas%20Prihasti%20Laraswari Url / pada tanggal (12 November 2016).

Pada masa pemerintahan Roo Moo Hyun (2003 – 2008) , upaya perdamaian dilakukan dengan cara-cara yang lebih lunak jika dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Upaya yang dilakukan bertujuan agar tetap terciptanya hubungan yang harmonis, resolusi damai terkait nuklir Korea Utara serta melakukan banyak kerjasama dan memberi bantuan pada Korea Utara.⁵ Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan pun di buat lebih banyak menguntungkan pihak Korea Utara.

Namun lagi – lagi Korea Utara tetap meningkatkan pengembangan nuklirnya yang membuat President Roo pada saat itu berasumsi bahwa apa yang dilakukan Korea Utara sangatlah mengkhawatirkan. Banyak para elit politik yang beranggapan bahwa upaya yang dilakukan oleh Presiden Roo hanyalah sia-sia. Kendati *Sunshine policy* lebih menguntungkan Korea Utara di bidang ekonomi.

Jika pada masa pemerintahan Roh Moon Hyun *Sunshine Policy* masih digunakan walaupun banyak pihak yang menentang, lain halnya dengan pemerintahan Lee Myung Bak. Dikutip dari salah satu portal berita resmi milik Korea Selatan dikatakan bahwa:⁶

“Pelantikan presiden Lee menandai kelahiran rezim pemerintahan yang konservatif sekaligus pragmatis, menggantikan rezim pemerintahan terdahulu

⁵ San, D. (N.D.). Kepentingan Pemerintahan Roh Moohyun Terhadap Reunifikasi Korea Tahun 2003-2007. Retrieved November 12, 2016, From http://www.academia.edu/10044174/Kepentingan_Pemerintahan_Roh_Moohyun_Terhadap_Reunifikasi_Korea_Tahun_2003-2007

⁶ Anonym, “Lee Myung Bak dan Kebijakan Luar Negerinya”, diakses dari Url http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=1776 pada tanggal (29 november 2016) pukul 22:13

yang lebih ideologis dan bersifat progresif. Rezim pemerintahan Lee dimulai dengan dukungan publik yang sangat besar untuk Presiden Lee serta harapan yang kuat akan kemajuan ekonomi Negara”.

Sebagai Presiden yang seharusnya meneruskan kebijakan pemimpin yang terdahulu, justru membuat presiden Lee Myung Bak merubah kebijakan yang sudah ada. Pada era pemerintahan Presiden Lee, melihat tidak ada perkembangan dari *Sunshine Policy*, President Lee lebih memilih untuk tidak menggunakan *Sunshine Policy* sebagai kebijakan dan poliitk luar negerinya. Lee Myung Bak lebih menggunakan sikap tegasnya terhadap kebijakan-kebijakan yang di buatnya yang berkaitan dengan bantuan terhadap Korea Utara.⁷

Lee Myung Bak lebih menggunakan sikap tegasnya terhadap kebijakan-kebijakan yang di buatnya yang berkaitan dengan bantuan terhadap Korea Utara.⁷ hal ini di anggap dapat menekan Korea Utara terhadap upaya pengembangan nuklirnya. Sementara itu, presiden Lee myung bak menginginkan agar wilayah Semenanjung Korea bebas dari ancaman nuklir.⁸

⁷ Moren. Reaksi Korea Utara Terhadap Kebijakan Korea Selatan Memberhentikan Batuan Ekonomi Terhadap Korea Utara (2008 – 2011) Pekanbaru: Universitas Riau Kampus Bina Widya

⁸ Anonym, “Lee Myung Bak Ingin Korea Bebas Nuklir”, diakses dari Url dari <http://global.liputan6.com/read/152472/lee-myung-bak-ingin-korea-bebas-nuklir> pada tanggal (29 november 2016)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka pertanyaan yang dapat di tarik ialah “**Mengapa presiden Lee Myung Bak tidak melanjutkan *Sunshine policy* terkait reunifikasi Korea?**”

C. Tujuan Penulisan

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu *Sunshine Policy* dan seberapa jauh pengaruh *Sunshine Policy* dalam membantu upaya reunifikasi Korea. serta factor – factor apa saja yang mempengaruhi Presiden Korea Selatan dalam membuat kebijakan baru terkait reunifikasi Korea.

D. Kerangka Teoritik

Dalam membahas *Sunshine Policy* milik korea selatan yang pada awalnya di gagas oleh mantan presiden Kim Dae Jung, serta alasan tidak di lanjutkan nya *Sunshine Policy* sebagai kebijakan politik luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Lee Myung Bak, maka penulis menggunakan konsep pengambilan keputusan (*decision making process*) oleh William D Coplin.

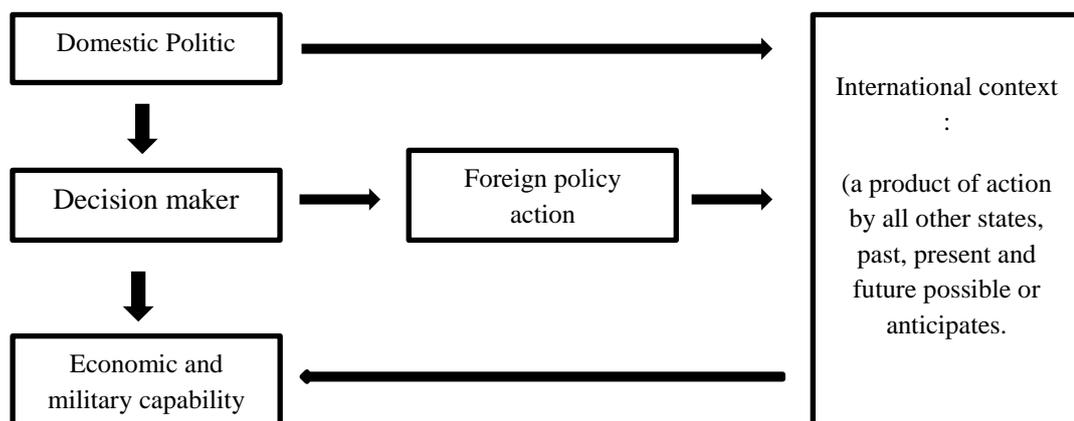
Konsep Pengambilan Keputusan

Konsep pembuatan keputusan dalam buku pengantar Politik Internasional Oleh William D Coplin memusatkan perhatian pada aktor ataupun orang-orang dalam sebuah negara yang berperan penting serta memiliki tanggung jawab yang sah dalam mengambil keputusan untuk negaranya dalam pergaulan lingkup

internasional. Sehingga perilaku Negara tergantung pada keputusan yang dibuat oleh aktor pembuat keputusan.⁹

Para pembuat dan pengambil keputusan tentunya telah melakukan banyak pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan apa yang menjadi politik luar negeri negaranya. Mengutip langsung dari buku karangan William D Coplin yang mengatakan bahwa :¹⁰

“ Salah besar jika kita menganggap bahwa para pengambil keputusan politik luar negeri bertindak sembarangan. Akan tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tertentu yang diambil mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri yang mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Kedua, kemampuan ekonomi Dan militer. Dan yang ketiga ialah konteks internasional yaitu posisi khusus negara dalam hubungan nya dengan negara lain dalam sistem itu”. seperti penjelasan pada tabel di bawah ini



⁹ William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis ,(Bandung ,Sinar Baru Algensindo), Hal.30.

¹⁰ Ibid., hlm. 30.

Kondisi politik dalam negeri meliputi keadaan dalam negeri seperti atribut-atribut system politik dalam negeri, stabil- tidak stabilnya keadaan politik dalam negeri. Politik dalam negeri nyatanya merupakan seperangkat determinan yang bekerjasama dalam menentukan politik luar negeri suatu Negara dengan Negara-negara lain.¹¹

Kondisi ekonomi dan militer merupakan dua kemampuan yang memainkan peran penting dalam memberikan dukungan terhadap para pembuatan keputusan politik luar negeri. Setiap Negara harus memiliki kemampuan sebagai alat tawar dalam berpolitik dengan Negara lain. Kemampuan tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan yang dapat melindungi suatu Negara dari ancaman Negara – Negara lain. Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang tengah dihadapi .

Politik luar negeri suatu Negara memang selalu dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negerinya, seperti situasi ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Dimana factor-faktor tersebut saling berhubungan. Namun pada konteks ini, pemimpin Negara lah yang memiliki hak yang sah yang berhak mengambil keputusan tersebut. Biasanya, kebijakan ataupun politik luar negeri dibuat sebagai respon dari tindakan politik Negara lain

Dalam membahas dan menganalisa keputusan yang diambil oleh presiden Lee Myung Bak terkait politik luar negerinya terhadap Korea Utara, maka konteks

¹¹ Ibid., hlm. 171.

internasional merupakan factor serta alasan tepat yang mempengaruhi presiden Lee Myung Bak dalam mengambil keputusan. Keadaan di Korea Utara lah yang membuat Presiden Lee untuk merubah kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara. hubungan kedua Negara yang tidak harmonis serta letak wilayah yang begitu dekat menjadi pemicu utamanya.

Tindakan Korea Utara yang terus melakukan pengembangan Nuklir membuat presiden Lee harus merevisi *Sunshine Policy* menjadi kebijakan yang lebih tegas sunshine policy tidak digunakan sebagai bentuk reaksi dari uji coba nuklir dimana keamanan militer mendeteksi bahwa tindakan uji coba nuklir yang dilakukan korea utara dianggap sebagai ancaman bagi negaranya.

Keputusan ini diambil untuk dapat menekan tindakan Korea Utara dalam hal pembangunan nuklir yang sangat mengancam keamanan Korea Selatan. Tindakan Korea Utara tidak hanya mengancam keamanan negara namun juga kredibilitas dan integritas Lee sebagai Presiden dalam menyelesaikan krisis dan ancaman ini. Presiden Lee yang merupakan sosok Pragmatis merasa bahwa geram dengan korea Utara yang tak kunjung melakukan denuklirisasi.¹²

Konsep National Interest

Politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah:¹³

¹² Vidyana Putri. 2015 : Pengaruh Karakteristik Pemimpin Korea Selatan Terhadap Implementasi Sunshine Policy tahun 1998 - 2010: Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Vol. 4,No. 01:1971.

¹³ Jack C Plano, Robert E Riggs, Helenan S Robin, Kamus Analisa Politik (Jakarta: Rajawali, 1994), hal. 226

“Foreign policy is a strategy or planned course or action developed by the decision makers of a state vis a vis other states or international entities, aimed at achieving specific goals defined in term of national interest.”

Dapat disimpulkan bahwa Politik luar negeri yang di buat oleh pembuat keputusan bertujuan untuk mencapai tujuan atau kepentingan negaranya. Politik luar negeri selalu berkaitan dengan kepentingan nasional suatu Negara.

Karna jika Negara tidak memiliki kepentingan nasional, maka Negara tersebut tidak akan menjalankan politik luar negerinya. Menurut Jack C Plano dalam bukunya yang berjudul *The International Relations Dictionary*,¹⁴ kepentingan nasional adalah :

“Tujuan mendasar dan penentu utama yang menuntun pembuat keputusan Negara dalam membuat kebijakan luar negeri. kepentingan nasional suatu negara biasanya konsepsi yang sangat umum dari elemen-elemen yang merupakan kebutuhan paling vital suatu Negara. Termasuk Kemerdekaan, Pelestarian Diri, Integritas Teritorial, Keamanan Militer, Kesejahteraan Ekonomi ”.

Kepentingan nasional merupakan tujuan suatu Negara dan merupakan factor penentu seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan Negara nya. Kepentingan nasional merupakan cita-cita suatu Negara yang ingin di capai harus dilakukan melalui cara berpolitik, baik dengan cara berdiplomasi ataupun membuat kebijakan luar negeri. Sehingga cita-cita dan kepentingan tersebut dapat dicapai walaupun dalam proses jangka panjang.

¹⁴ Jack C Plano, Roy Olton, *The International Relations Dictionary* (United State of America : Western Michigan University, 1969), hlm. 128

Kepentingan nasional Korea Selatan adalah menjaga keamanan Negara nya dari ancaman nuklir Korea Selatan serta reunifikasi Korea. Berhubung kedua Negara ini berada dalam satu wilayah yang dekat. Paska pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara, hal ini mengakibatkan situasi dan kondisi yang menegangkan diantara kedua Negara.

Semua bangsa pastinya memiliki identitas nasional negaranya sendiri, begitupun Korea. Semenanjung Korea umumnya memiliki identitas terkuat di Asia Timur, sehingga Stabilitas regional Asia timur juga yang paling penting untuk kepentingna nasional Korea. perdamaian di Korea sangatlah dibutuhkan. Arti keamanan bagi Korea Selatan untuk negarnya setelah perang masa silam sangatlah penting, terutama jika melihat Korea Utara yang dikelilingi oleh negara-negara berpengaruh besar seperti Cina, Jepang, Rusia yang sewaktu-waktu dapat membantu Korea Utara untuk melakukan provokasi terhadap Korea Selatan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin Korea Selatan berfokus pada memaksimalkan kepentingan nasional mereka termasuk isu-isu tentang Korea Utara.

Keamanan nasional Korea Selatan yang terancam karna genjatan senjata perang di amsa silam tidak dapat mengubah perilaku Korea Utara. masing-masing pihak berusaha untuk terus mencapai kepentingna nasional dnegan memperkuat barisan militer.

Korea selatan memberi respon dengan mengambil sikap merubah kebijakan lama dengan kebijakan baru untuk menjaga dan mempertahankan diri

dari ancaman nuklir. Selain itu, sebagai bentuk upaya dari tindakan korea utara, korea selatan mengeluarkan kebijakan yaitu upaya rakyat menggunakan angkatan bersenjata sebagai inti dan fungsi pemerintah dalam menegakan ketahanan nasional.¹⁵ Ini juga sebagai salah satu cara korea selatan, dalam upaya reunifikasi korea yang belum menemukan titik terang.

E. Hipotesa

hipotesa yang dapat diambil ialah bahwa presiden Lee tidak melanjutkan *Sunshine Policy* karna adanya upaya pengembangan nuklir serta uji coba nuklir yang terus dilakukan oleh Korea Utara. Tindakan yang jelas mengancam stabilitas keamanan Korea Selatan serta memperlambat upaya Reunifikasi Korea. Adanya isu HAM di Korea Utara yang belum terselesaikan, sehingga hal tersebut menjadi perhatian Presiden Lee Myung Bak. Karna implementasi sunshine policy terdahulu tidak ikut serta menyelesaikan isu HAM karna khawatir akan mengganggu kerjasama lain nya.

F. Batasan Penelitian

Adapun batas penelitian di tentukan dari tahun 2008 – 2013. 2008 dimana presiden Lee Myung Bak mulai menjabat sebagai presiden Korea Selatan menggantikan mantan Presiden Roo Moo Hyun. Dan di tahun yang sama yaitu 2008 , presiden Lee Myung Bak mengganti kebijakan luar negeri Korea Selatan

¹⁵ Haikal Hasan Thalib, “ Kebijakan Pertahanan Keamanan Korea Selatan Dalam Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara Antara Tahun 2002 – 2012”, Tesis Sarjana Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Hlm. 3, T.D.

dari Sunshine Policy menjadi kebijakan garis keras dalam menghadapi Korea Utara terkait reunifikasi Korea. Masa jabatan presiden Lee Myung Bak berakhir di tahun 2013, yang ditandai berakhirnya juga kebijakan garis keras yang digagasnya.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskripsi analisis. Dalam penyajian data penulis mengumpulkan data-data dan teori yang berasal dari berbagai sumber melalui studi kepustakaan (*library research*). Yaitu dengan cara mengumpulkan data dari studi kepustakaan, journal-journal, berita media cetak serta data-data dari situs yang dianggap relevan oleh penulis. Serta data yang diambil juga merupakan data yang dibutuhkan dalam proses penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab 1

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka teoritik, hipotesa, batasan penelitian, metode penelitian

Bab II

Pada bab dua akan membahas implementasi *Sunshine Policy* sebelum masa pemerintahan Presiden Lee Myung Bak. Terlebih dahulu akan dibahas sejarah terpisahnya Korea yang akhirnya memunculkan *Sunshine Policy* sebagai kebijakan Reunifikasi Korea. kemudian penjelasan secara general implementasi

Sunshine Policy pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae Jung Dan pada masa pemerintahan Presiden Roh Moo Hyun.

Bab III

Di bab tiga akan membahas kelanjutan *Sunshine Policy* serta *Hardline Policy* sebagai kebijakan pengganti *Sunshine Policy* pada masa pemerintahan Presiden Lee Myung Bak.

Bab IV

Bab empat berisi alasan Alasan Lee Myung Bak tidak melanjutkan *Sunshine Policy* dalam upaya Reunifikasi Korea

Bab V

Bab lima berisi kesimpulan Dan penutup